

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab II dan bab III dan analisis yang telah dilakukan pada bab IV maka terdapat kesimpulan yang pada dasarnya memberikan jawaban rada identifikasi masalah yang dimuat pada bab I. kesimpulan pertama adalah :

- Pengaturan mengenai *right to be forgotten* yang terdapat dalam GDPR dapat dijadikan acuan untuk Indonesia saat menyusun Undang-Undang Perlindungan data. Indonesia tidak perlu mengikuti peraturan GDPR tetapi GDPR disini digunakan sebagai contoh peraturan yang baik mengenai perlindungan data pribadi.
- Pengaturan pasal 26 ayat (3) merupakan *right to be forgotten*, hanya saja pengaturannya berbeda dengan *right to be forgotten* secara umum.
- *Right to be forgotten* tidak dapat diberlakukan kepada public figure karena saat seseorang menjadi public figure ruang lingkup perlindungan data pribadi mereka menjadi semakin luas karena kepentingan public untuk mencari informasi menjadi semakin luas.
- Kebutuhan akan kepastian mengenai pelaksanaan dari *right to be forgotten* yang terdapat pada pasal 26 ayat (3) semakin dibutuhkan dan semakin mendesak.
- Keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi semakin dibutuhkan demi adanya kepasyian hukum mengenai

perlindungan data pribadi.

- Peraturan pemerintah pelaksana dari Unda-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah ada draft yang akan segera di sahkan. Semoga pengesahan peraturan pemerintah tersebut dilakukan dengan secepatnya karena peraturan tersebut sangat dibutuhkan.
- RUU perlindungan data pribadi kemungkinan besar akan masuk kedalam Prolegnas 2019 karena urgensi dari perlindungan data pribadi di Indonesia

Kesimpulan kedua yang dapat diambil adalah:

- Pengaturan mengenai penghapusan data di Indonesia memang sudah ada sejak lama, tetapi masih tersebar di banyak peraturan.
- Penghapusan data yang terdapat di undang-undang lain selain UU ITE Revisi merupakan pemusnahan data yang dimana daya guna data tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah melewati jangka waktu yang telah dilewati.
- Pengaturan *right to be forgotten* pada pasal 26 ayat (3) UU ITE Revisi belum didukung dengan peraturran-peraturan yang ada di Indonesia.
- Pengaturan *right to be forgotten* pada pasal 26 ayat (3) seharusnya bukam dimasukkan kedalam UU ITE tetapi haris dimasukkan dalam ruang lingkup UU Perlindungan Data Pribadi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan, yaitu :

- Dalam membuat peraturan pemerintah harusnya lebih melihat kepada kesiapan dari masyarakat di Indonesia. sehingga peraturan yang dibuat memang tepat sasaran dan memang memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia.
- Untuk mengadopsi suatu asas hendaknya pemerintah juga memahami terlebih dahulu bagaimana asas tersebut akan diaplikasikan di Indonesia. Buat peraturan yang memang julus dan terperinci. Jika memang nantinya akan ada aturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan diharapkan peraturan tambahan tersebut dikeluarkan dengan cepat agar tidak menimbulkan kekosongan hukum.
- Sosialisasi terhadap masyarakat juga merupakan hal yang penting, sehingga nanti jika ada undang-undang baru yang akan diberlakukan masyarakat sudah memahami dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.F. Elly Erawaty, *Pedoman Menulis Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia : Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh. Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

Kovenan Internasional Tentan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR) 1966

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

*Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013 68/167.  
The right to privacy in the digital age*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

*Regulations (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on The Protection of Natural persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Privacy Regulation*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik.

### C. JURNAL

Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. Yustisia, vol. 5 No.1 , Januari – April 2016, hlm. 22 – 30. (<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712> diakses pada 21 September 2018)

Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti & Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Pribadi Terkait Privacy Right Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infoemasi Dan Transaksi Elektronik* (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10713> diunduh pada 5 september 2018)

Rosalinda Elsin Latumahina, aspek *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Gema Aktualia, Vol. 3 No.2 Desember 2014, hlm. 14 – 25

Masitoh Indriyani, dkk., perlindungan privasi dan data pribadi konsumen daring pada online marketplace system, *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 1 No. 2 Oktober 2017, hlm. 191 – 208 ([https://www.researchgate.net/publication/323009377\\_Perlindungan\\_Privas](https://www.researchgate.net/publication/323009377_Perlindungan_Privas) diakses pada 9 september 2018)

Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, *Veritas Et Justitia*, Vol. 4 No.1 2018, hlm. 88-101 (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2916> diakses pada 4 Oktober 2018 pada 17.50 WIB)

#### D. SUMBER INTERNET SELAIN JURNAL

Kamus populer, *Pengertian Chatting dan Sejarah chatting* <http://www.mandalamaya.com/pengertian-chatting-dan-sejarah-chatting/> diakses pada 1 April 2018

*Sejarah kaskus*, <https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/214603738-sejarah-KASKUS>, diakses pada tanggal 1 April 2018

Marisa Agape Depari, *Yuk Menengok Sejarah Media Sosial*, diakses di <https://student.cnmindonesia.com/edukasi/20160630161342-317-142169/yuk-menengok-sejarah-media-sosial/> pada tanggal 1 April 2018

Fiiona Suwana, *Indonesia Sangat Membutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, diakses di <http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607> pada tanggal 25 Juni 2018

*Duhaime's Law Dictionary* diakses di [www.duhaime.org/LegalDictionary/R/RighttoBeForgotten.aspx](http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/RighttoBeForgotten.aspx) pada tanggal 26 maret 2018.

Anisa Widyasari, *Right to be forgotten dalam UU ITE*, diakses di <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> pada tanggal 1 April 2018.

Thomas macaulay, *What is right to be forgotten and where did it come from* (<https://www.techworld.com/data/could-right-be-forgotten-put-people-back-in-control-of-their-data-3663849/> diakses pada 9 agustus 2018)

Edward I carter, *The Right to be forgotten* <http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613/9780190228613-e-189> diakses pada 5 agustus 2018

Mohammad iqsan sirie, *mengenal right to be forgotten* <https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt586219e8e529d/mer-right-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie-> diakses pada 18 September 2018

Ernst oliver Wilhelm, A brief history of the General Data Protection Regulation <https://iapp.org/resources/article/a-brief-history-of-the-general-data-protection-regulation/> diakses pada 6 september 2018

Elsam, rapporteur  
<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/rapporteur/> diakses  
pada 20 September 2018

Patrick Nohe, What is the *Right to be forgotten*?  
<https://www.thesslstore.com/blog/right-to-be-forgotten/> diakses pada 30  
Agustus 2018

Hukumonline, Ini Bedanya Konsep *Right to be forgotten* di Indonesia dengan  
Negara Lain  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain> diakses  
pada 5 September 2018

James Lim, *South Korea Releases Right to be forgotten Guidance*  
<https://www.bna.com/south-korea-releases-n57982070847/> diakses pada 8  
Oktober 2018

Yulchon LLC, *South Korea: Korea Communications Commission Releases Guidelines On "The Right to be forgotten"*  
<http://www.mondaq.com/x/561018/IT+internet/Korea+Communications+Co>  
diakses pada 15 Oktober 2018

Sidley Austin LLC, *South Korea Releases Guidance on Right to be forgotten*  
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=21be3837-0c43-4047-b8b5-9e863960b0b9> diakses pada 7 Oktober 2018

M. Sridhar Archaryulu, *When it isn't right to forget*  
<https://indianexpress.com/article/opinion/columns/personal-data-protection-bill-2018-justice-bn-srikrishna-committee-5355284/> diakses  
pada 21 Oktober 2018



Dodi Senjaya, *RUU perlindungan Data pribadi penting jadi prolegnas 2019*  
<http://elsam.or.id/2018/10/ruu-perlindungan-data-pribadi-penting-menjadi-prioritas-prolegnas-2019/> diakses pada 30 Oktober 2019

## Notes

[←1]

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama ,2009, hlm. 2

[←2]

ibid., hlm, 4

[←3]

Kamus populer, *Pengertian Chatting dan Sejarah chatting*, 2014,  
[www.mandalamaya.com/pengertian-chatting-dan-sejarah-chatting/](http://www.mandalamaya.com/pengertian-chatting-dan-sejarah-chatting/) , akses tanggal  
1 April 2018.

[←4]

*Sejarah kaskus*, diakses di <https://bantuan.kaskus.co.id/hc/id/articles/214603738-sejarah-KASKUS> , pada tanggal 1 April 2018.

[←5]

Marisa Agape Depari, *Yuk Menengok Sejarah Media Sosial*, diakses di <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20160630161342-317-142169/yuk-menengok-sejarah-media-sosial/> pada tanggal 1 April 2018.

[←6]

Fiiiona Suwana, *Indonesia Sangat Membutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, diakses di <http://theconversation.com/indonesia-sangat-memerlukan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-92607> pada tanggal 25 Juni 2018

[←7]

Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional Refika Aditama : Bandung 2015 hlm. 3

[←8]

ibid., hlm. 24



[←9]

*Right to be forgotten is a right to have personal information deleted from someone party's electronic or paper records or database. Duhaime's Law Dictionary diakses di [www.duhaime.org/LegalDictionary/R/RighhttobeForgotten.aspx](http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/RighhttobeForgotten.aspx) pada tanggal 26 maret 2018.*

[←10]

Anisa Widyasari, *Right to be forgotten dalam UU ITE*, diakses di <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> pada tanggal 1 April 2018.

[←11]

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, lampiran I hal 78.

[←12]

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan IV. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001, hlm 37

[←13]

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh.  
Malang: Bayumedia Publishing, 2013, Hlm 295

[←14]

Id., Hal 296

[←15]

Danrivanto Budhiyanto, *Revolusi cyberlaw Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2017 hlm. 13

[←16]

*ibid.* hlm. 26



[←17]

*ibid.* hlm. 15

[←18]

Thomas Macaulay, *What is the Right to be forgotten and where did it come from?*, *tech world* (<https://www.techworld.com/data/could-right-be-forgotten-put-people-back-in-control-of-their-data-3663849/> diakses 19 September 2018)

[←19]

Thomas Macaulay, *ibid.*

[←20]

LBH PERS, Hak Atas Penghapusan Informasi Di Indonesia, LBH PERS : Jakarta .  
September 2018.

[←21]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*, Refika Aditama : Bandung 2015, hlm.1

[←22]

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi

[←23]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm. 23

[←24]

Rosalinda Elsina Latumahina, *op. cit.* hlm. 17



[←25]

Sinta Dewi Rosadi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia Vol.5 No.1, Januari – April 2016, hlm. 26

[←26]

Rosalinda Elsina Latumahina, *op. cit.* hlm. 24

[←27]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm.17

[←28]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm. 18

[←29]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm 18-19

[←30]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*, *op.cit.* hlm. 20

[←31]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm. 139

[←32]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional* , *op.cit.* hlm hlm 17



[←33]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm hlm. 38-39

[←34]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*, *op.cit.* hlm hlm. 40

[←35]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm hlm. 44

[←36]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional* , *op.cit.* hlm 45

[←37]

*ibid.*

[←38]

*ibid.* hlm. 56

[←39]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional* ,*op.cit.* hlm hlm. 57-58

[←40]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional* , *op.cit.* hlm. 26



[←41]

Sinta Dewi Rosadi, *ibid.* . hlm hlm. 26

[←42]

Thomas Macaulay, What is the *right to be forgotten* and where did it come from?, tech world (<https://www.techworld.com/data/could-right-be-forgotten-put-people-back-in-control-of-their-data-3663849/> doakes 19 September 2018)

[←43]

International Commissioner's Office , *op. cit.*

[←44]

Agen perlindungan data pribadi spanyol

[←45]

European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

[←46]

European Court of Human Rights

[←47]

Edward L. Carter , *Right to be forgotten*, Oxford research encyclopedia

[←48]

Mohammad Iqsan Sirie, Mengenal *Right to be forgotten*

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie-> diakses 22 September 2018)



[←49]

Ernst O. Wilhelm, A Brief History of the General Data Protection Regulation  
(<https://iapp.org/resources/article/a-brief-history-of-the-general-data-protection-regulation/> diakses pada 20 september 2018)

[←50]

ibid.

[←51]

Rapporteur berasal dari bahasa Perancis yang menunjukkan posisi dari seseorang yang diutus/ditunjuk oleh suatu badan untuk membuat sebuah laporan resmi kegiatan sebuah forum. Rappoetuer adalah orang yang melakukan pencatatan tertulis apa yang terjadi dan apa yang disampaikan dalam sebuah pertemuan atau forum (<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/rapporteur/> diakses pada 20 September 2018)

[←52]

Ernst O. Wilhelm, Op. Cit.

[←53]

International Commissioner's Office, *Overview General Data Protection Regulation*,  
20 october 2017

[←54]

Komisi Eropa, *Question and Answer – General Data Protection Regulation*,  
Brussels, 24 Januari 2018

[←55]

LBHPERS, Op.cit. hlm. 19

[←56]

ibid. Hlm.19-20



[←57]

Patrick Nohe, *What Is Right to be forgotten*, The SSLstore  
(<https://www.thesslstore.com/blog/right-to-be-forgotten/> diakses pada 18  
Oktober 2018)

[←58]

Hukum *Online*, Ini Bedanya Konsep *Right to be forgotten* di Indonesia dengan Negara Lain diunggah pada 27 Desember 2016

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain> diakses pada 18 Oktober 2018)

[←59]

South Korea Releases *Right to be forgotten* Guidance diunggah pada 9 Mei 2016 (<https://www.bna.com/south-korea-releases-n57982070847/> diakses pada 18 Oktober 2018)

[←60]

Yulchon LLC, South Korea: Korea Communications Commission Release Guidelines on “*The Right to be forgotten*” diunggah pada 19 Januari 2016

(<http://www.mondaq.com/x/561018/IT+internet/Korea+Communications+Commis>: diakses pada 18 Oktober 2018)

[←61]  
ibid.

[←62]

Sidney Austin LLP, South Korea Release Guidance on *Right to be forgotten* diunggah pada 9 Mei 2016 (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g-21be3837-0c43-4047-b8b5-9e863960b0b9> diakses pada 18 Oktober 2018)

[←63]

Yulchon LLC, Op.Cit.

[←64]

M. Sridhar Acharyulu, When It Isn't *Right to forget* diunggah pada 14 September 2018 (<https://indianexpress.com/article/opinion/columns/personal-data-protection-bill-2018-justice-bn-srikrishna-committee-5355284/> diakses pada 18 Oktober 2018)



[←65]

Shubham Mishra, *Right to be forgotten*: Evolving Right In Indian Democracy, RSSPR Blog Series. VIT School of Law, Chennai

[←66]

ibid.

[←67]

Terj. “hal ini sejalan dengan *right to be forgotten* yang dipergunakan oleh Negara-negara Barat dalam kasus yang sensitive menyangkut wanita secara umum dan kasus sangat sensitif menyangkut pemerkosaan dan mempengaruhi harga diri dan reputasi orang yang bersangkutan.”

[←68]

Salah satu portal hukum *online* di India

[←69]

Shubham Mishra, Op. Cit.

[←70]

Terj. “setiap orang menjalani kehidupan yang benar memiliki hak akan kebahagiaan yang meliputi kebebasan dari segala jenis serangan pada pribadi dirinya, kehidupan sosialnya atau reputasinya.”

[←71]

Patric Nohe, What Is The *Right to be forgotten* diunggah pada 9 Maret 2016

(<https://www.thesslstore.com/blog/right-to-be-forgotten/> diakses pada 18 oktober 2018)

[←72]

ibid.



[←73]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm hlm. 138

[←74]

Sinta Dewi Rosadi, *op. cit.* hlm. 93

[←75]

*ibid.* hlm. 139

[←76]

Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Pribadi Terkait Privacy Right Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar bali, hlm. 3

[←77]

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

[←78]

LBH Pers, Op. Cit. hlm. 52

[←79]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm. 4

[←80]

Lihat Penjelasan UU ITE 11/2008



[←81]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm. 5

[←82]

Naskah akademik perubahan UU ITE no 11/2008 hlm 4

[←83]

*ibid.* hlm 4-5

[←84]

*ibid.* hlm. 5

[←85]

*Ibid.* hlm 6

[←86]

*Ibid*

[←87]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm. 94

[←88]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm. 24



[←89]

Danrivanto Budhiyanto , *op. cit.* hlm. 95

[←90]

*Ibid.* . hlm. 96

[←91]

Penjelasan UU ITE no 19/2016

[←92]

Anisa Widyasari, *Right to be forgotten* dalam UU ITE diunggah pada 19 Desember 2016 (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> diakses pada 19 Oktober 2018)

[←93]

**LBH Pers, op.cit. hlm 25**

[←94]

*ibid.*

[←95]

Danrivanto Bidhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 13

[←96]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm. 23



[←97]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional, op.cit.* hlm hlm. 38-39

[←98]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*, *op.cit.* hlm hlm. 40

[←99]

*ibid.* hlm 45

[←100]

*ibid.* hlm. 56

[←101]

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*, *op.cit.* hlm hlm. 57-58

[←102]

Bojana Kostic, United Nations : New Resolution on The Right to Privacy in the digital age (<https://merlin.obs.coe.int/iris/2017/5/article2.en.html> diakses pada 10 November 2018)

[←103]  
ibid.

[←104]

Thomas Macaulay, What is the *right to be forgotten* and where did it come from?, tech world (<https://www.techworld.com/data/could-right-be-forgotten-put-people-back-in-control-of-their-data-3663849/> diakses 19 September 2018)



[←105]

International Commissioner's Office , *op. cit.*

[←106]

Agen perlindungan data pribadi spanyol

[←107]

Mohammad Iqsan Sirie, Mengenal *Right to be forgotten*

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie-> diakses 22 September 2018)

[←108]

Hukumonline, Ini bedanya konsep *right to be forgotten* di Indonesia dengan Negara lain, diunggah pada 27 Desember 2016

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain> diakses pada 3 November 2018)

[←109]

South Korea Releases *Right to be forgotten* Guidance diunggah pada 9 Mei 2016 (<https://www.bna.com/south-korea-releases-n57982070847/> diakses pada 18 Oktober 2018)

[←110]

Yulchon LLC, South Korea: Korea Communications Commission Release Guidelines on “*The Right to be forgotten*” diunggah pada 19 Januari 2016

(<http://www.mondaq.com/x/561018/IT+internet/Korea+Communications+Commis>: diakses pada 18 Oktober 2018)

[←111]  
ibid.

[←112]

Sidney Austin LLP, South Korea Release Guidance on *Right to be forgotten* diunggah pada 9 Mei 2016 (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g-21be3837-0c43-4047-b8b5-9e863960b0b9> diakses pada 18 Oktober 2018)



[←113](#)

Yulchon LLC, Op.Cit.

[←114]

LBH Pers, *Op..Cit.*, hlm. 4

[←115]

'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

[←116]

Berdasar UUIITE revisi pasal 1 angka 6 Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

[←117](#)

Antoon De Baets, *A Historian's View On The Right to be forgotten*, International Review Of Law, Computers & Technology, Vol. 30, No. 1-2, Hlm 57-66, Routledge : 21 Februari 2016

[←118]

Dodi Sanjaya, *RUU Perlindungan Data Pribadi, Penting menjadi prioritas prolegnas 2019*, diunggah pada 29 Oktober 2018 (<http://elsam.or.id/2018/10/ruu-perlindungan-data-pribadi-penting-menjadi-prioritas-prolegnas-2019/> diakses pada 6 Oktober 2018)

[←119]

Oxford Advanced Learner's Dictionary 7<sup>th</sup> edition

[←120](#)

Komisi Eropa, *Question and Answer – General Data Protection Regulation*,  
Brussels, 24 Januari 2018



[←121]

Agen perlindungan data pribadi spanyol

[←122]

European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

[←123]

European Court of Human Rights

[\[←124\]](#)

Edward L. Carter , *Right to be forgotten*, Oxford research encyclopedia

[←125]

Mohammad Iqsan Sirie, Mengenal *Right to be forgotten*

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie-> diakses 22 September 2018)

[←126]

Annisa Widyasari, *right to be forgotten* dalam UU ITE

(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> diakses pada 4 November 2018)